



**PERAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN HIU DI  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

Disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan  
Pendidikan Strata I  
Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro

**Penyusun**

**Made Ayu Ananda Aulia**

**14010414140098**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2021**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Peran Pemerintah dalam Perlindungan Hiu di Indonesia  
Nama Penyusun : Made Ayu Ananda Aulia  
NIM : 14010414140098  
Program Studi : S-1 / Hubungan Internasional

Dinyatakan sah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata I

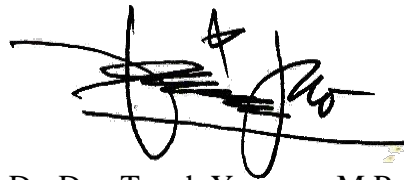
Semarang, 30 Juni 2021

Dekan

Wakil Dekan I



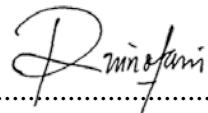
Dr. Drs. Hardi Warsono, MTP  
NIP 196408271990011001



Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin  
NIP 196908221994031003


### Dosen Pembimbing:

1. Dr. Dra. Reni Windiani, MS.

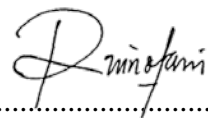
  
(.....)

### Dosen Penguji Skripsi:


1. Ika Riswanti Putranti, A.Md.Ak., S.H., M.H., Ph.D.

  
(.....)

2. Dr. Dra. Reni Windiani, MS.

  
(.....)

3. Satwika Paramasatya, SIP.,M.A.

  
(.....)

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH (SKRIPSI)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Made Ayu Ananda Aulia  
Nomor Induk Mahasiswa : 14010414140098  
Program Studi : S1 Hubungan Internasional  
Alamat : Jalan Widosari III / 25, Semarang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) yang saya tulis berjudul:

### Peran Pemerintah dalam Perlindungan Hiu di Indonesia

Adalah benar-benar **Hasil Karya Ilmiah Tulisan Saya Sendiri**, bukan hasil karya ilmiah orang lain dan juga tidak mengandung plagiasi dari sumber informasi lainnya. Hal ini diperkuat dengan hasil uji kemiripan Turnitin yang kurang dari 20%.

Apabila di kemudian hari ternyata karya ilmiah yang saya tulis itu terbukti bukan hasil karya ilmiah saya sendiri atau hasil plagiasi karya orang lain, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan hasil karya ilmiah saya dengan seluruh implikasinya, sebagai akibat kecurangan yang saya lakukan.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh kesadaran serta tanggung jawab.

Semarang, 30 Juni 2021

Mengetahui  
Dosen Pembimbing 1



Dr. Dra. Reni Windiani, MS.  
NIP. 196509031989022001

Pembuat Pernyataan



Made Ayu Ananda Aulia  
NIM. 14010414140098

Ketua Program Studi



Dr. Dra. Reni Windiani, MS.  
NIP. 196509031989022001

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan yang Maha Esa, yang mana telah memberikan kenikmatan yang tidak terkira sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Peran Pemerintah dalam Perlindungan Hiu di Indonesia”. Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah guna memenuhi salah satu syarat untuk bisa mencapai gelar Strata 1 Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.

Dalam penyusunan dan pengerjaan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa syukur serta penghormatan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mendukung, membantu, dan memfasilitasi penyusunan skripsi ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, saudara dan saudari, dan seluruh keluarga saya. Terima kasih atas segala doa, kasih sayang, kepercayaan dan perhatian yang tak pernah surut diberikan kepada penulis dan terus memberikan dukungan dan juga motivasi untuk berjuang tanpa kenal lelah dan selalu berusaha sebaik mungkin.
2. Ibu Ika Riswanti Putranti, S.H., M.H., Ph.D, selaku dosen wali penulis yang telah memberikan banyak masukan dan nasehat kepada penulis terkait dengan perkuliahan sehingga akhirnya penulis dapat menjalani perkuliahan dengan baik.
3. Segenap Dosen Departemen Hubungan Internasional Universitas Diponegoro atas ilmu yang diberikan selama perkuliahan sehingga dapat menjadi bekal penulis dalam menulis skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat HI UNDIP 2014, Yoga Arfiansyah Firdaus, M. Tahrizi Aziz, dan Clarissa Ivana Dinansi atas bantuan dan dukungan moril kepada penulis dari awal proses perkuliahan hingga penulisan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Segala kritik dan saran penulis terima sebagai dorongan untuk menciptakan karya-karya yang lebih baik di masa depan. Akhir kata, penulis berharap penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini dapat membantu untuk penelitian lebih lanjut atau sekedar menambah pengetahuan dan menjadi referensi peneliti lain di masa mendatang.

Semarang, 30 Juni 2021



Made Ayu Ananda Aulia

# **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Untuk Ibunda Tercinta

## **HALAMAN MOTTO**

Peace is not unity in similarity, but also unity in diversity.

# DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN KEASLIAN ILMIAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.4.1 Manfaat Akademis.....	7
1.4.2 Manfaat Praktis.....	8
1.5 Kerangka Pemikiran.....	8
1.5.1 Konsep Compliance.....	8
1.6 Metode Penelitian.....	11
1.6.1 Tipe Penelitian .....	12
1.6.2 Teknik Analisis Penelitian.....	12
1.6.3 Jangkauan Penelitian .....	13
1.6.4 Teknik Pengumpulan Data .....	13

1.6.5 Sistematika penulisan .....	13
<b>BAB II CITES DAN PERBURUAN HIU DI INDONESIA.....</b>	<b>14</b>
2.1 Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) .....	15
2.2 Pengaturan Perdagangan Satwa Langka dalam Kerangka Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) ....	16
2.3 Regulasi CITES .....	19
2.4 Perilaku Perburuan Ikan Hiu dan Pengaruhnya Terhadap Keseimbangan Ekosistem di Laut .....	20
2.5 Klasifikasi Pembagian Jenis Hiu serta Daftar Hiu yang Mendapat Perlindungan CITES .....	22
2.6 Keberadaan Ikan Hiu di Indonesia .....	25
2.7 Pemanfaatan Anggota Tubuh Hiu dalam Kasus Perburuan Ikan Hiu.....	29
2.8 Studi Kasus Perburuan Ikan Hiu Tanjung Luar, Lombok Timur .....	29
<b>BAB III ANALISIS PERAN SERTA UPAYA PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN IKAN HIU DI INDONESIA .....</b>	<b>32</b>
3.1 Peran Pemerintah .....	32
3.2 Upaya Pokok dan Target Konservasi Pemerintah Indonesia .....	33
3.3 Kebijakan Utama Pengelolaan Hiu dan Pari.....	34
3.4 Regulasi Terkait dengan Ikan Hiu dan Pari .....	34
3.4.1 Regulasi Nasional .....	34
3.4.1.1 Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa.....	34
3.4.1.2 Kep. MenKP No. 18 Tahun 2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Ikan Hiu Paus (Rhincodontypus).....	35
3.4.1 Regulasi Regional .....	35
3.4.3 Regulasi Internasional Melalui CITES .....	35
3.5 Iklim dan Kondisi Perdagangan Hiu di Indonesia .....	36
3.6 Evaluasi Pengelolaan Perburuan Ikan Hiu di Indonesia dalam Implementasi Aturan CITES .....	37



3.7 Analisis Upaya Perlindungan Ikan Hiu di Indonesia dari Upaya Perburuan...38

**BAB IV PENUTUP .....43**

4.1 Kesimpulan .....43

4.2 Saran.....44

**DAFTAR PUSTAKA .....46**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1.</b> Perbedaan Konsep <i>Non-Compliance</i> dan <i>Compliance</i> Berdasarkan Mitchell (2007).....	10
<b>Tabel 2.1.</b> Jenis Hiu .....	21
<b>Tabel 2.2.</b> Jenis Hiu yang Dilindungi Berdasarkan CITES dan IUCN .....	21

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b> Komposisi Total Penangkapan Spesies Hiu .....	19
---	----

## DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations (Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara)
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Bakamla	: Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
BPSPL	: Balai Pengelola Sumber Daya Pesisir dan Laut
CITES	: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Konvensi Perdagangan Internasional Tumbuhan dan Satwa Liar Spesies Terancam)
GT	: Gross Tonnage
IUUF	: Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (Penangkapan Ikan secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Belum Diatur)
RFMO's	: Regional Fisheries Management Organizations
IOTC	: Indian Ocean Tuna Commision (Komisi Tuna Samudera Hindia)
IMO	: International Maritime Organization (Organisasi Maritim Internasional)
KKP	: Kementerian Kelautan dan Perikanan
Menko	: Menteri Koordinator
MPA	: Marine Protected Area (Kawasan Laut yang Dilindungi)
NGO	: Non-Governmental Organization (Organisasi Non-Pemerintah)
Satgas	: Satuan Tugas
SIPI	: Surat Izin Penangkapan Ikan
UU	: Undang-Undang
WWF	: World Wild Fund for Future

SAJI-LN : Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri

SAJI-DN : Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri

## **ABSTRAK**

Perburuan hiu di Indonesia yang semakin meningkat membuat pemerintah melakukan beberapa upaya dalam merespon fenomena ini. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan meratifikasi CITES baik dalam produk hukum maupun kebijakannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah dalam perlindungan hiu di Indonesia tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif melalui pendekatan konsep *compliance* oleh Robert B. Mitchell. Hasil penelitian ini menemukan bahwa peran pemerintah dalam perlindungan hiu di Indonesia masih belum maksimal. Pemerintah masih belum memenuhi target yang diharapkan oleh CITES. Dalam hal ini, tingkat kepatuhan Indonesia terhadap IEA tersebut tergolong dalam *Coincidental Compliance*.

Kata Kunci: CITES, Peran Pemerintah, Kepatuhan, Perburuan Hiu

## **ABSTRACT**

Shark hunting in Indonesia is increasing, making the government make several efforts to respond to this phenomenon. One of the efforts made by the government is to ratify CITES both in its legal products and policies. This study aims to determine the extent of the government's role in protecting sharks in Indonesia. This study uses a qualitative research method with a descriptive type of using the concept of compliance approach by Robert B. Mitchell. The results of this study found that the government's role in protecting sharks in Indonesia is still not optimal. The government still has not met the targets expected by CITES. Therefore, Indonesia's level of compliance with the IEA is classified as Coincidental Compliance.

Keywords: CITES, Role of Government, Compliance, Shark Hunting.